

LAMPIRAN

MATRIKS

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025**

VISI	
BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA	

MISI	
MISI 1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA, SEHAT DAN CERDAS
MISI 2	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING
MISI 3	MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI
MISI 4	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA

MATRIK
KONDISI, TANTANGAN, ISU STRATEGIS, VISI, MISI, DAN KEBIJAKAN
RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

(ASPEK SOSIAL BUDAYA)

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
1.	ASPEK SOSIAL BUDAYA							
			Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, dan Kesejahteraan Sosial	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat Dan Cerdas				
1.1.	Urusan Kebudayaan							
	- Kehidupan masyarakat yang mengutamakan norma agama dan tata nilai sosial budaya - Keragaman hidup beragama dan toleransi antar agama yang tetap terpelihara	Pengaruh dan dampak dari luar yang bertentangan dengan norma agama dan tata nilai sosial budaya masyarakat serta mempertahankan secara berkesinambungan	Norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat		Membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	- Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya - Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya - Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
1.2.	• Urusan Pendidikan • Urusan Perpustakaan							
	• Pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum optimal • Masih rendahnya budaya baca masyarakat	• Pendidikan yang bermutu serta terjangkau • Memasyarakatkan budaya baca • Pengembangan orientasi pendidikan yang berstandar internasional dan tanggap lptek	• Pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan terjangkau • Tingkat budaya baca masyarakat		• Meningkatkan taraf pendidikan dan minat baca masyarakat	• Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	• Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau	• Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
							• Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan lptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha	• Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
1.3.	Urusan Kesehatan							
	• Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal • Derajat kesehatan masyarakat relatif belum baik	• Perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang sehat baik secara fisik maupun sosial dalam mendukung produktivitas masyarakat	• Aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat		• Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat	• Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	• Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	• Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin
							• Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat	• Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
1.4.	Urusan Sosial							
	• Ketidakberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Partisipasi potensi sumberdaya kesejahteraan sosial (PSKS) yang belum memadai	• Perlindungan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Pemberdayaan dan penurunan tingkat kerawanan sosial	• Keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial		• Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial • Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
1.5.	Urusan Ketenagakerjaan							
	• Pertumbuhan angkatan kerja belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja yang tersedia • Persaingan angkatan kerja antar daerah yang semakin ketat • Masih kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan	• Kualitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha • Kompetensi tenaga pengawas ketenagakerjaan	• Pengangguran dan produktivitas tenaga kerja • Perlindungan tenaga kerja		• Meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja	• Meningkatkan kesempatan kerja • Menurunnya tingkat pengangguran • Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja • Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	• Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha	• Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								• Peningkatan kerjasama pengawasan ketenagakerjaan antara kab./kota dan provinsi • Peningkatan kualitas SDM tenaga pengawas ketenagakerjaan
1.6.	Urusan Ketransmigrasian							
	• Terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha	• Kualitas transmigran serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	• Pengangguran dan kemiskinan		• Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran	• Meningkatnya kesejahteraan hidup dan terbangunnya kemandirian transmigran	• Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran	• Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain
1.7.	• Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	• Peran serta perempuan dan perlindungan anak belum memadai • Pemberdayaan masyarakat dan desa masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah	• Peran perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa	• Keberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa		• Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa	• Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa	• Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa	• Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								• Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif
1.8.	• Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil • Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
	• Pertumbuhan dan perkembangan penduduk masih cukup tinggi • Pengelolaan administrasi kependudukan yang masih belum optimal	• Pertumbuhan dan persebaran penduduk untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan penduduk	• Perkembangan jumlah penduduk		• Mengendalikan perkembangan penduduk	• Terkendalinya pertumbuhan penduduk	• Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk • Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	• Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan
1.9.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga							
	• Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal • Pemasarakatan dan prestasi olahraga belum memadai	• Sumberdaya kepemudaan dan keolahragaan yang produktif dan berprestasi	• Peran dan kualitas kepemudaan dan keolahragaan dalam pelaksanaan pembangunan		• Meningkatkan produktivitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan	• Meningkatnya kualitas dan peran kepemudaan dalam pembangunan • Meningkatnya pemasarakatan dan prestasi olah raga	• Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan • Peningkatan pemasarakatan dan prestasi olah raga	• Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda • Pembinaan dan pemasarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								• Pembinaan manajemen keolahragaan

MATRIK
KONDISI, TANTANGAN, ISU STRATEGIS, VISI, MISI, DAN KEBIJAKAN
RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

(ASPEK PEREKONOMIAN)

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
2.	ASPEK PEREKONOMIAN							
			Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Global	Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing				
2.1.	• Urusan Penanaman Modal • Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
	• Pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat • Pertumbuhan dan perkembangan penanaman modal • Iklim investasi cukup kondusif • Struktur perekonomian yang rentan terhadap pengaruh global • Peran dan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi belum optimal	• Kualitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan • Tingkat persaingan investasi antar daerah yang semakin tinggi • Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	• Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi didukung investasi • Kualitas perekonomian dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi		Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian	• Meningkatnya investasi daerah • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi • Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat	• Peningkatan iklim investasi yang kondusif	• Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi
							• Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi	• Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								besar dengan UMKM-Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
2.2.	• Urusan Pertanian • Urusan Kelautan dan Perikanan • Urusan Industri • Urusan Perdagangan • Urusan Kehutanan							
	• Produktivitas pertanian cenderung menurun • Perkembangan usaha agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan dalam arti luas • Lahan pertanian cenderung semakin berkurang	• Tingkat persaingan usaha dan kualitas produk perekonomian yang semakin kompetitif • Reorientasi dan pengembangan pasar produk perekonomian	• Produktivitas, kualitas dan daya saing perekonomian		Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar	• Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan • Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian,

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								perkebunan, kehutanan dan kelautan
	• Perkembangan industri pengolahan cenderung menurun • Terbatasnya pangsa pasar industri pengolahan • Kemitraan usaha antar pelaku usaha industri belum optimal					• Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri	• Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal • Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor	• Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
	• Perkembangan perdagangan cenderung meningkat dan tinggi • Kemitraan usaha antar pelaku usaha perdagangan belum optimal • Terbukanya pangsa pasar baik domestik maupun ekspor					• Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan	• Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	• Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
	• Perkembangan jasa pariwisata (perhotelan dan restoran) cenderung meningkat dan tinggi					• Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata	• Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata	• Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata
	• Perkembangan jasa keuangan cenderung meningkat dan tinggi					• Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa keuangan	• Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan	• Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan
2.3.	Urusan Ketahanan Pangan							
	• Perkembangan tingkat konsumsi bahan pangan meningkat dan tinggi • Produktivitas	• Distribusi bahan pangan • Pengaturan dan pengawasan tata niaga perdagangan bahan pangan	• Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pangan		Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	• Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	• Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan	• Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
	pertanian tanaman pangan cenderung menurun							• Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan
			Pengembangan Pelayanan Kepelabuhanan Skala Nasional Dan Internasional Serta Peningkatan Prasarana Dan Sarana Wilayah					
2.4.	• Urusan Pekerjaan Umum • Urusan Perhubungan							
	• Pelayanan sarana kepelabuhanan yang belum optimal	• Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepelabuhanan	• Pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional		Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional	• Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional	• Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional	• Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								• Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan
					Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar wilayah			
2.5.	• Urusan Pekerjaan Umum • Urusan Perhubungan							
	• Keterbatasan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan belum memadai • Pelayanan sarana perhubungan darat yang belum optimal (Angkutan darat, kereta api & ASDP) • Pelayanan sarana bandar udara yang belum optimal	• Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan dalam wilayah dan antar wilayah (sistem transportasi Jawa-Sumatera) • Pengembangan moda angkutan darat, kereta api dan ASDP • Pengembangan bandar udara perintis	• Sistem transportasi yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan			• Meningkatnya pelayanan sistem transportasi	• Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan	• Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa-Sumatera
							• Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP	• Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan
							• Peningkatan pelayanan bandar udara	• Pengelolaan bandar udara yang ada

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								• Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan
2.6.	Urusan Pekerjaan Umum							
	• Keterbatasan daya dukung sarana prasarana sumberdaya air	• Peningkatan kebutuhan air baku dalam mencukupi ketahanan pangan	• Pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan			• Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air	• Peningkatan pengelolaan sumberdaya air	• Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi
2.7.	Urusan Pekerjaan Umum							
	• Keterbatasan kapasitas dan kualitas drainase • Rawan bencana banjir	• Peningkatan secara berkelanjutan upaya pengendalian banjir	• Pengendalian banjir			• Meningkatnya pelayanan drainase • Menurunnya jumlah lokasi rawan banjir	• Pengelolaan pengendalian banjir	• Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase
2.8.	Urusan Pekerjaan Umum							
	• Cakupan dan kualitas pelayanan air bersih belum memadai	• Peningkatan kebutuhan air bersih terutama bagi masyarakat miskin	• Cakupan dan kualitas pelayanan air bersih			• Meningkatnya pelayanan air bersih	• Peningkatan pelayanan air bersih	• Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih
2.9.	• Urusan Pekerjaan Umum • Urusan Lingkungan Hidup							
	• Cakupan dan kualitas pelayanan persampahan dan pengelolaan air limbah belum memadai	• Pengelolaan persampahan dan air limbah yang ramah lingkungan	• Cakupan dan kualitas pelayanan persampahan dan air limbah			• Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah	• Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah	• Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional
2.10.	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral							
	• Keterbatasan kapasitas energi dan listrik • Pelayanan listrik pedesaan belum memadai	• Peningkatan kebutuhan energi dan listrik	• Krisis energi dan listrik			• Meningkatnya pelayanan energi dan listrik	• Peningkatan pelayanan energi dan listrik	• Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan
2.11.	Urusan Komunikasi dan Informatika							
	• Cakupan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan informatika belum optimal	• Peningkatan kebutuhan telekomunikasi dan informatika • Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika yang pesat	• Cakupan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan informatika			• Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika	• Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika	• Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan
					Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman			
2.12.	Urusan Perumahan							
	• Ketersediaan perumahan layak huni belum	• Peningkatan kebutuhan perumahan dan	• Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau			• Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau	• Peningkatan pengembangan perumahan layak	• Fasilitasi pembangunan perumahan bagi

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
	memadai • Keterbatasan daya beli masyarakat terhadap perumahan	pengembangan rumah susun sederhana di perkotaan					huni dan terjangkau	masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan
2.13.	Urusan Perumahan							
	• Lokasi dan luas kawasan kumuh cenderung meningkat	• Pengendalian kawasan kumuh	• Penataan kawasan kumuh			• Berkurangnya kawasan kumuh	• Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh	• Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh

MATRIK
KONDISI, TANTANGAN, ISU STRATEGIS, VISI, MISI, DAN KEBIJAKAN
RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

(ASPEK TATA RUANG, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP)

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
3.	ASPEK TATA RUANG, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP							
			Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari				
3.1.	Urusan Penataan Ruang							
	• Perencanaan tata ruang belum memadai • Pengendalian penataan ruang belum optimal • Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang belum memadai	• Penataan dan optimalisasi fungsi, struktur dan pola pemanfaatan ruang	• Kualitas penataan ruang		Meningkatkan kualitas penataan ruang	• Meningkatnya kualitas penataan ruang	• Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	• Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah • Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
							• Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal	• Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I • Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II • Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III
3.2.	Urusan Lingkungan Hidup							
	• Pengelolaan sumber daya alam belum optimal	• Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	• Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan		Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam	• Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	• Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	• Penataan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam pada kawasan budi daya • Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam pada kawasan lindung • Pemulihan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam • Pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam • Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
	• Terbatasnya daya dukung lingkungan	• Pengendalian pencemaran lingkungan • Pendayagunaan teknologi ramah lingkungan • Implementasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	• Degradasi kualitas lingkungan hidup		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	• Terjaganya daya dukung lingkungan hidup • Menurunnya tingkat pencemaran	• Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	• Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
	• Terdapat kawasan-kawasan yang rawan terjadi bencana alam	• Antisipasi kejadian bencana alam	• Bencana alam		Meminimalisir dampak bencana alam	• Berkurangnya kerugian moril dan materil akibat bencana alam	• Mitigasi dan penanggulangan bencana alam	• Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam

MATRIK
KONDISI, TANTANGAN, ISU STRATEGIS, VISI, MISI, DAN KEBIJAKAN
RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

(ASPEK PEMERINTAHAN)

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
4.	ASPEK PEMERINTAHAN							
			Pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa				
4.1.	• Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian • Urusan Kearsipan • Urusan Statistik • Urusan Perencanaan Pembangunan							
	• Kapasitas sumber daya aparatur yang belum optimal • Ketersediaan data dan informasi pembangunan belum memadai • Kualitas perencanaan dan pembangunan daerah yang belum optimal • Kapasitas kelembagaan IPTEK	• Peningkatan secara berkelanjutan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan data dan informasi serta kualitas perencanaan pembangunan daerah • Peningkatan sumberdaya IPTEK	• Kinerja penyelenggaraan pemerintahan		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	• Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK	• Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur	• Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
						• Meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	• Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	• Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
							• Peningkatan kerjasama pembangunan	• Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi
	• Kualitas pelayanan publik yang memadai	• Daya saing pelayanan publik	• Kualitas dan daya saing pelayanan publik		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	• Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik	• Peningkatan kualitas pelayanan publik	• Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
								• Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal
	• Kapasitas keuangan daerah yang memadai • Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	• Kapasitas keuangan daerah	• Kapasitas dan kemandirian keuangan daerah		Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah	• Meningkatnya pendapatan daerah • Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah • Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	• Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	• Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah
						• Meningkatnya kontribusi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta	• Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah	• Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
	Potensi pembentukan daerah otonom baru	Aspirasi pembentukan kabupaten/kota baru	Pemekaran Kabupaten/kota baru		Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pelayanan publik	Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru	- Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan - Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru
	Komitmen dan kesadaran yang kuat dari masyarakat untuk patuh dan taat hukum	Supremasi hukum	Penataan dan supremasi hukum		Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat	Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum	Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan	- Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum - Penegakan dan penataan produk hukum daerah - Penegakan supremasi hukum
4.2.	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri							
	Kualitas kehidupan demokrasi dan politik yang kondusif	Peningkatan secara berkelanjutan kualitas kehidupan demokrasi	Kualitas kehidupan demokrasi		Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat	Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat	- Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi - Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik

NO.	KONDISI	TANTANGAN	ISU STRATEGIS	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	ARAH/FOKUS KEBIJAKAN
	Keamanan dan ketertiban umum yang kondusif	Ketentraman dan ketertiban umum	Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	- Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib - Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum